

PENGARUH PERSAINGAN EKONOMI POLITIK, BELANJA DAERAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2015-2023)

Fatimah Shobiyatun Rosayanti¹; Siska Yuli Anita²; Rahmat Fajar Ramdani³

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

Email : fatimahshobiyatunrosayanti@gmail.com¹; siskayulianita@radenintan.ac.id²;
rahmatfajar@radenintan.ac.id³

ABSTRAK

Isu kemiskinan yang tinggi dan tidak merata di 34 provinsi Indonesia menjadi fenomena sentral dalam penelitian ini, mengingat kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang secara fundamental menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Persaingan Ekonomi Politik, Belanja Daerah, dan Laju Pertumbuhan Penduduk, terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel model *Fixed Effect Model* (FEM), dengan menggunakan perangkat lunak *EVIEWS 13*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel persaingan ekonomi politik, belanja daerah dan laju pertumbuhan penduduk secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan secara parsial variabel persaingan ekonomi politik berpengaruh negatif dan signifikan, sementara belanja daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan pentingnya persaingan ekonomi politik yang sehat dan transparan untuk meningkatkan kualitas Belanja Daerah yang fokus pada pemberdayaan demi mencapai tujuan *maqasid syariah*.

Kata Kunci : Tingkat Kemiskina; Persaingan Ekonomi Politik; Belanja Daerah; Laju Pertumbuhan Penduduk

ABSTRACT

The issue of high and disparate poverty rates across 34 provinces in Indonesia is the central phenomenon of this study, as poverty is a multidimensional problem that fundamentally hinders the fulfillment of basic needs. This research aims to analyze the impact of Political-Economic Competition, Regional Expenditure, and Population Growth Rate on Poverty Levels in Indonesia through an Islamic Economics Perspective. Using a quantitative approach, this study employs panel data analysis with the Fixed Effect Model (FEM) via EViews 13 software. The results simultaneously show that political-economic competition, regional expenditure, and population growth rate collectively influence poverty levels. Partially, political-economic competition has a significant negative effect, while regional expenditure has a negative but insignificant effect, and population growth rate has an insignificant positive effect on poverty levels in Indonesia. This study underscores the importance of healthy and transparent political-economic competition in enhancing the quality of empowerment-focused regional expenditure to achieve Maqasid al-Shari'ah objectives.

Keywords : Poverty Level; Political Economic Competition; Regional Expenditure; Population Growth Rate

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan di Indonesia menunjukkan diskrepansi data yang signifikan antara lembaga nasional dan internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya tren penurunan dari 11,13% pada tahun 2015 menjadi 9,36% pada tahun 2023, Bank Dunia justru menunjukkan adanya lonjakan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari 54 juta menjadi 67 juta jiwa. Ketidakselarasan ini dipertegas oleh laporan *World Population Review* (WPR) yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-73 negara termiskin di dunia (Agus Triono and Sangaji 2023). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun upaya pembangunan berkelanjutan terus diupayakan, penghapusan kemiskinan sebagaimana target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 masih menghadapi tantangan struktural yang besar dan perlu penanganan yang serius (Lestari and Busnetty 2022).

Tingkat kemiskinan merupakan permasalahan sosial ekonomi yang menunjukkan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan maupun non-pangan, serta menjadi faktor dominan pemicu rendahnya tingkat pendidikan, tingginya kriminalitas, dan pekerja anak di bawah umur (Agustia, Anita, and Hasimi 2025). Sebagai isu krusial, kondisi ini mengakibatkan jutaan rakyat mengalami keterbatasan sandang, pangan, papan, serta kesulitan dalam mengakses tabungan dan jaminan Kesehatan (Habibah et al. 2020).

Presentase tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2015–2023 menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah yang cukup besar. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di kawasan timur Indonesia seperti Papua sekitar 26%, Papua Barat 20,49%, NTT 19,96%, Maluku 16,42%, dan Gorontalo 15,15%. Tingkat kemiskinan sedang terdapat pada provinsi Sulawesi Tengah, Bengkulu, Lampung, Aceh, dan Kalimantan Barat dengan rata-rata kemiskinan sekitar 10%–13%. Sementara itu, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah seperti Bali, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, serta sebagian wilayah di pulau Jawa berada pada kisaran 4%–7% (Badan Pusat Statistik 2025).

Ketimpangan kemiskinan antarwilayah ini disebabkan oleh faktor struktural, yaitu dominasi sektor agraris yang tidak stabil di wilayah timur dibandingkan diversifikasi industri di Pulau Jawa (Purwanti 2024). Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kualitas SDM serta distribusi anggaran publik yang tidak merata akibat ketidakefektifan otonomi daerah (Barabasi and Atmanti 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan kemiskinan antarwilayah menunjukkan belum tercapainya prinsip keadilan distributif (*al-adl*), akibat konsentrasi kesejahteraan yang hanya berpusat di wilayah tertentu (Aprianto 2017). Masalah ini harus diatasi melalui kebijakan inklusif guna menjamin akses sumber daya dan memastikan harta tidak hanya beredar di kalangan elit atau wilayah maju saja (Humairah and Alimuddin 2023). Oleh karena itu,

penguatan tata kelola ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh wilayah demi mewujudkan kesejahteraan yang merata dan hakiki (Susilo 2025).

Dalam ajaran islam di bahas prinsip keadilan distribusi bagi semua umat, perintah tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr [59]:7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr [59]:7).

Perspektif ekonomi Islam menempatkan keadilan distributif sebagai prinsip penting untuk mencegah kemiskinan struktural dan penumpukan kekayaan pada pihak tertentu, sejalan dengan Surah Al-Hasyr ayat 7 (Tasriani et al. 2024). Penerapan nilai keadilan (*al-adl*) ini dilakukan melalui kebijakan yang mengutamakan pemerataan kesejahteraan dan pembatasan penguasaan harta yang berlebihan (Amin 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 ketimpangan kemiskinan di Indonesia semakin diperparah oleh adanya pandemi Covid-19, dimana persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan dari 9,78% pada semester pertama menjadi 10,19% pada semester kedua (Santoso et al., 2022). Krisis ini menimbulkan dampak kesenjangan antarwilayah semakin besar, di mana wilayah dengan keunggulan di sektor pariwisata seperti Bali mengalami kontraksi ekonomi yang besar, sementara wilayah padat penduduk seperti di Pulau Jawa menghadapi tekanan pada sektor kesehatan dan industri jasa. Sebaliknya, beberapa wilayah di luar Pulau Jawa menunjukkan ketahanan ekonomi cukup baik karena ditopang oleh sektor yang bersifat resilien (Fitriana and Mabur 2020). Kondisi ketimpangan kemiskinan ini masih terus terjadi antar provinsi meskipun setelah pasca Covid-19, dimana kesejahteraan masih tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Emile Durkheim dalam teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang saling bergantung, di mana kemiskinan diinterpretasikan sebagai bentuk disfungsi subsistem dalam memelihara keseimbangan (*equilibrium*). Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan fakta sosial yang menciptakan ketidakstabilan struktur, terutama ketika terjadi ketidakefektifan kebijakan belanja daerah dan dinamika ekonomi politik. Oleh karena itu, penguatan peran institusi pemerintah sangat diperlukan untuk

memulihkan fungsi sistem dan memastikan terciptanya tatanan masyarakat yang stabil serta harmonis (Khara and Soren 2025).

Kebijakan fiskal melalui alokasi belanja daerah memegang peranan vital dalam pengentasan kemiskinan, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi rakyat (Rabani and Hutabarat 2025). Namun, efektivitas anggaran ini sering kali terhambat oleh dinamika ekonomi politik yang memicu ketimpangan distribusi sumber daya, sehingga kesejahteraan tidak terdistribusi secara adil sesuai prinsip ekonomi Islam (Arbiansa, Bahtiar, and Sisdianto 2025). Kondisi tersebut kian krusial mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk yang terus menekan kapasitas layanan publik dan infrastruktur (Bunga and Haryanto 2024). Tanpa pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran, tekanan demografi ini justru akan memperluas kesenjangan sosial (Saputri and Sitorus 2025). Keterkaitan antara kebijakan anggaran, struktur politik, dan tekanan demografi tersebut mempertegas pemikiran para pakar mengenai determinan utama kemiskinan.

Terdapat beberapa pendapat ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pertama, menurut Douglass North, persaingan ekonomi politik yang tidak sehat memicu ketimpangan distribusi sumber daya. Kedua, menurut Musgrave dan Musgrave menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah di sektor sosial dan infrastruktur untuk mempercepat penurunan kemiskinan (Sianturi, Syafii, and Tanjung 2021). Ketiga, Thomas Malthus memandang laju pertumbuhan penduduk yang pesat sebagai beban ekonomi yang melampaui kapasitas produksi sehingga memicu kemiskinan kronis.

Kualitas demokrasi Indonesia periode 2015–2023 menunjukkan stabilitas pada kategori sedang dengan fluktuasi sebesar 60 sampai 80. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat ketimpangan spasial yang tajam antarprovinsi di mana DKI Jakarta mencatat kualitas demokrasi tertinggi dengan rata-rata sebesar 85,73, sementara wilayah timur Indonesia seperti Papua Barat mencatat rata-rata terendah sebesar 63,94 (Badan Pusat Statistik 2022). Kesenjangan ini disebabkan oleh dominasi elit lokal serta lemahnya institusi daerah dalam menjamin hak sipil, sehingga diperlukan tata kelola yang lebih responsif (Romadhona and Syavera 2025). Djeudo (2013) memandang persaingan ekonomi politik sebagai instrumen strategis untuk kebijakan yang dibuat demi kepentingan kolektif. Persaingan yang sehat menciptakan mekanisme *check and balances* yang mendorong aktor politik bersikap responsif terhadap kepentingan publik dan membatasi manipulasi elit (Calabrese 2020).

Dalam sistem desentralisasi, belanja daerah merupakan instrumen fiskal utama yang secara teoritis berfungsi mendorong aktivitas ekonomi produktif dan menanggulangi kemiskinan (Bawimbang, Rorong, and Siwu 2021). Berdasarkan teori Oates, Musgrave, dan Keynes, peran ini dijalankan dengan memposisikan pengeluaran pemerintah sebagai penggerak

utama permintaan agregat di daerah (Anggun and Sari 2024a). Optimalisasi belanja pada sektor infrastruktur terbukti menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi yang inklusif (Smas et al. 2025), meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada pemerataan distribusi pembangunan guna mengatasi efek tunda (*delayed effects*) agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang (Heriqbaldi et al. 2025).

Data realisasi belanja daerah di Indonesia selama tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan, di mana rata-rata belanja tertinggi tercatat di Papua Barat sekitar 100,11% dan terendah di DKI Jakarta sekitar 78,84% (DJPK 2025). Disparitas ini menunjukkan adanya perbedaan pengelolaan anggaran dan struktur ekonomi antar daerah. Belanja daerah yang rendah di beberapa wilayah dapat diartikan sebagai indikasi efisiensi fiskal atau ketergantungan pada pendapatan dari sektor ekonomi perkotaan yang sudah kuat.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan persentase perubahan populasi tahunan berdasarkan angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi, mendistorsi distribusi pendapatan per kapita, serta membebani kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan layanan publik (Salsabila, Agustin, et al. 2022).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya disparitas pertumbuhan penduduk yang signifikan, dengan pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau sekitar 3% serta kontraksi terendah di DKI Jakarta dengan penurunan sebesar 0,38% (Badan Pusat Statistik 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak selaras dengan ekspansi ekonomi dan efisiensi belanja daerah berisiko memperburuk kemiskinan, sementara daerah dengan pertumbuhan rendah memerlukan manajemen anggaran yang strategis untuk mencegah stagnasi ekonomi (Salsabila, Agustin, et al. 2022).

Persaingan ekonomi politik menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan studi terdahulu, penelitian Susanti and Bariyah (2023) menunjukkan bahwa persaingan ekonomi politik melalui aspek hak politik mampu menekan kemiskinan, namun kebebasan sipil menunjukkan hasil yang kontradiktif. Temuan ini selaras dengan penelitian Khasanah (2021) yang menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi sangat penting untuk efektivitas program kesejahteraan. Secara kritis, hasil ini menunjukkan bahwa persaingan ekonomi politik di Indonesia masih berfokus pada aturan administratif dan belum menyentuh inti keadilan ekonomi. Terdapat celah dalam studi tersebut yakni minimnya integrasi antar indikator demokrasi dan kualitas birokrasi dalam model yang diuji melalui prinsip amanah dan moralitas ekonomi islam.

Dalam dimensi kebijakan fiskal, terdapat kesamaan temuan antara penelitian Rosang, Maramis, and Kawung (2025) dan Anggun and Sari (2024). Keduanya membuktikan bahwa

realisasi belanja daerah terbukti menurunkan angka kemiskinan secara nyata di berbagai wilayah. Meski demikian, efektifitas belanja tersebut tidak seragam karena disparitas kualitas pengelolaan anggaran antarwilayah. Terdapat celah dalam studi tersebut meliputi cakupan penelitian terbatas pada wilayah tertentu yakni kabupaten nabir dan perbatasan Kalimantan Barat, sehingga hasilnya belum mencerminkan kondisi nasional sepenuhnya. Selain itu terdapat celah, belum ada evaluasi apakah alokasi belanja di tingkat daerah tersebut telah memenuhi standar keadilan dalam ekonomi Islam untuk melindungi hak masyarakat miskin secara luas.

Selanjutnya, variabel laju pertumbuhan penduduk menunjukkan temuan yang bervariasi dan cenderung kontadiktif. Berdasarkan penelitian Perkasa and Siregar (2024) menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. Sedangkan penelitian Cahyo, Setyowati, and Prabowo (2022) menyatakan jumlah penduduk mencatat korelasi yang berbeda tergantung tingkat pendidikan, namun posisi penduduk tetap menjadi kunci dalam keseimbangan sumber daya. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak penduduk sangat tergantung pada konteks wilayah masing-masing. Penelitian ini memiliki celah yang terletak pada perlunya menguji variabel laju pertumbuhan penduduk dalam skala nasional yang lebih besar guna melihat pola hubungannya secara lebih konsisten.

Berdasarkan analisis kritis terhadap literatur terdahulu, penelitian ini mengidentifikasi tiga celah utama. Pertama, terdapat celah konseptual, di mana penelitian terdahulu cenderung membahas variabel politik, belanja daerah, dan pertumbuhan penduduk secara parsial. Kedua, *population gap*, di mana cakupan penelitian sebelumnya masih terbatas pada tempat dan periode waktu yang sempit. Ketiga, adanya kekosongan metodologis dalam menguji variabel makro tersebut menggunakan kerangka ekonomi Islam secara kuantitatif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan ketiga variabel utama ke dalam satu model empiris menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia periode 2015–2023. Kebaruan utama studi ini terletak pada perluasan skala penelitian dari tingkat wilayah ke tingkat nasional, sehingga menghasilkan temuan yang lebih representatif bagi kebijakan publik di Indonesia. Selain itu, kebaruan perspektif dihadirkan melalui penggunaan kerangka ekonomi Islam untuk mengevaluasi apakah alokasi belanja daerah dan kontestasi politik telah memenuhi kaidah keadilan distributif. Melalui penggabungan data statistik terbaru dan pendekatan normatif syariah, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengukur hubungan teknis antar-variabel, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam melihat kemiskinan sebagai hasil sistemik yang harus diselaraskan dengan nilai kesejahteraan hakiki (*falah*).

Dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam untuk menganalisis pengaruh Persaingan Ekonomi Politik, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan

Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia (Analisis Data Panel Tahun 2015-2023).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional, yang diperkenalkan oleh tokoh sosiolog klasik seperti Emile Durkheim dan dikembangkan oleh Talcott Parsons, merupakan *grand theory* yang mendasari penelitian ini. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem sosial teratur yang terdiri dari sub-sistem yang saling terkait dan bekerja bersama untuk memelihara kondisi keseimbangan (*equilibrium*). Dalam teori ini kemiskinan diinterpretasikan sebagai fenomena struktural dan multidimensional yang muncul bukan hanya karena kegagalan individu, melainkan akibat disfungsi atau kegagalan subsistem dalam menjalankan peran esensialnya. Kemiskinan ini bersifat struktural karena mencakup masalah di tiga dimensi utama yakni dimensi ekonomi, dimensi politik, serta dimensi sosial. Teori ini menegaskan bahwasannya upaya pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada perbaikan sistem yang dominan agar fungsi-fungsi yang selama ini diemban oleh kemiskinan dapat digantikan oleh subsistem yang lebih optimal dan merata (Rosana 2019).

Teori Maqashid Syariah

Teori Maqashid Syariah yang dikembangkan secara sistematis oleh pakar hukum Islam Imam Abu Ishaq al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*, merupakan konseptual yang mendasari penelitian ini dalam perspektif ekonomi Islam. Teori ini memandang bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan kebijakan publik harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-daruriyyat al-khamsah*). Dalam teori ini, kemiskinan diinterpretasikan sebagai fenomena kegagalan sistemik yang menghambat terpenuhinya hak-hak dasar manusia, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kemiskinan dipandang bukan sekadar defisit materi, melainkan masalah multidimensional yang mengancam martabat manusia dan stabilitas sosial. Teori ini menegaskan bahwasannya upaya pengentasan kemiskinan harus diarahkan untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil agar fungsi-fungsi kemaslahatan dapat tercapai secara optimal dan merata guna mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi seluruh lapisan masyarakat (Nurwahidah, Janwari, and Jubaedah 2024).

Teori Sosial Demokrat (*Social Democratic Theory*)

Teori Sosial Demokrat yang dikembangkan oleh Cheyne, O'Brien, dan Belgrave (1998) serta diperbarui oleh Anthony Giddens mengonseptualisasikan kemiskinan sebagai konsekuensi dari kegagalan struktur sosial, bukan sekadar permasalahan individu. Teori ini menegaskan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik menyebabkan

kelompok marjinal tetap terperangkap dalam kemiskinan meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, intervensi negara melalui kebijakan jaminan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan dipandang sebagai instrumen vital untuk menciptakan kesetaraan peluang serta memutus rantai kemiskinan yang sistemik (Susanto and Pangesti 2019).

Menurut Alkire dan Foster kemiskinan tidak dipahami semata-mata sebagai rendahnya pendapatan, tetapi sebagai tumpang-tindih berbagai bentuk ketertinggalan yang bersifat struktural meliputi hambatan pendidikan, kesehatan, standar hidup yang layak serta keterbatasan pada akses sumber daya sosial, ekonomi dan politik, sehingga semakin banyak dimensi kesejahteraan yang tidak terpenuhi, maka semakin berat pula tingkat kemiskinan yang dialami dan semakin besar kebutuhan akan intervensi kebijakan negara untuk memperluas akses sumber daya dan layanan dasar bagi kelompok rentan (Alkire and Foster 2011).

Pengaruh Persaingan Ekonomi Politik Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Teori Persaingan Politik oleh Anthony Downs (1957) menganalogikan demokrasi sebagai mekanisme pasar, di mana kompetisi antarpartisipan politik menjadi prasyarat dalam menghasilkan kebijakan publik yang inklusif serta berorientasi pada kesejahteraan mayoritas. Teori ini menegaskan bahwa persaingan politik yang sehat dapat memitigasi monopoli kekuasaan yang menghambat pengentasan kemiskinan. (Besley, Persson, and Sturm 2008). Integrasi dari konsep *good governance* memperkuat teori ini melalui prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang dalam konteks Indonesia menjadi determinan utama dalam optimalisasi alokasi anggaran serta efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pengangguran (Meytriana et al. 2025).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ebi Susanti dan Nurul Bariyah (2023), dengan judul “Democracy and Poverty In Indonesia” menyatakan persaingan ekonomi politik melalui aspek hak politik dan Lembaga demokrasi sebagai aspek Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Susanti and Bariyah 2023).

H₁: Persaingan Ekonomi Politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2023.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Konsep belanja daerah dalam teori Keuangan Publik Richard Musgrave (1959) menguraikan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu alokasi sumber daya melalui penyediaan barang publik, distribusi pemerataan pendapatan melalui belanja sektor pendidikan dan kesehatan, serta stabilisasi keseimbangan ekonomi makro. Efektivitas belanja daerah bergantung pada alokasi tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal untuk mengurangi kemiskinan

dan ketimpangan, menjadi dasar analisis pengaruh belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Azwardi and Abukosim 2007).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Roario Estevan Rosang, Maulana Th. B. Maramis, George M.V. Kawung (2025), dengan judul “The Influence of Local Government Expenditure Realization and Investment on The Poverty Rate in Nabire Regency” menyatakan pengeluaran pemerintah melalui belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Rosang et al. 2025).

H₂: Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2023.

Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Teori kependudukan malthus dikembangkan oleh Thomas Robert Malthus pada tahun 1798. Teori kependudukan malthus teori klasik yang menggarisbawahi perbedaan laju pertumbuhan populasi dengan kapasitas produksi pangan dan sumber daya lainnya. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang eksponensial tanpa diimbangi pertumbuhan sumber daya akan menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Teori ini menegaskan pentingnya pengendalian populasi serta pengembangan ekonomi yang memadai agar tekanan pada sumber daya tidak meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial (Unat 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Muhammad Murjani Adi Perkasa, Syahrituah Siregar (2024), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angka Partisipasi Kasar, dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2015-2019” menyatakan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Perkasa and Siregar 2024).

H₃: Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2023.

Pengaruh Persaingan Ekonomi Politik, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Secara Simultan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Teori Struktural Fungsional menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena struktural dan multidimensional yang muncul akibat disfungsi subsistem ekonomi, politik, dan sosial, sehingga sinergi antara persaingan ekonomi politik, alokasi belanja daerah, dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan sebagai kesatuan subsistem yang saling terkait untuk menjaga keseimbangan sistem sosial (*equilibrium*) dan memastikan fungsi-fungsi esensial dalam pengentasan kemiskinan berjalan secara optimal.

H₄: Persaingan Ekonomi Politik, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2023.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan yaitu regresi data panel yang terdiri dari data *time series* tahun 2015-2023 dan data *cross section* di 34 provinsi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan data mengenai Persaingan Ekonomi Politik, Belanja Daerah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia yang telah di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2015-2023 sebanyak 34 provinsi di Indonesia.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih secara sistematis agar dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan (Putu Gede, 2024). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel 9 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2023 yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan *Sampling Jenuh*, di mana seluruh anggota populasi sebanyak 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2023 dijadikan sampel penelitian. Data yang di gunakan dalam penelitian merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Library Research* yang diperoleh dari publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta literatur-literatur lain yang membahas mengenai penelitian ini. Metode yang di gunakan yaitu pengolahan data menggunakan *evIEWS* 13.

Berdasarkan model regresi data panel dari gabungan data *cross section* dan data *time series* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TK_{it} = \alpha_i + \beta_1 PEP_{it} + \beta_2 BD_{it} + \beta_3 LPP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TK	: Tingkat kemiskinan
PEP	: Persaingan Ekonomi Politik
BD	: Belanja Daerah
LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
α_i	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi variable bebas
i	: Data cross section (34 Provinsi di Indonesia)
ε_{it}	: <i>Error term</i> (unsur pengganggu) pada unit ke-i dan waktu ke-t

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel, yaitu merupakan gabungan data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*), yang memungkinkan analisis dengan jumlah observasi yang lebih banyak sehingga meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan akurasi estimasi (Wahyudi 2020). Penggunaan data panel sangat unggul karena

meningkatkan efisiensi estimasi, memperbesar derajat kebebasan, dan mengatasi bias yang dihilangkan variabel melalui variasi antar unit dan waktu (Syukron and Fahri 2018).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel melalui ukuran pemusatan (mean, median) dan penyebaran (standar deviasi, minimum, maksimum) serta ukuran distribusi (kurtosis, skewness) dari setiap variabel (Sudana and Setianto 2024).

2. Model Estimasi Data Panel

Untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang akan dipakai pada penelitian ini, antara lain: *Pertama*, uji chow dilakukan untuk menentukan model yang digunakan antara CEM atau FEM. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05. *Kedua*, uji hausman dilakukan untuk menentukan model yang digunakan antara FEM atau REM. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 (Widodo et al. 2019).

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian syarat statistik yang harus dipenuhi agar model regresi data panel menghasilkan estimasi yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), yaitu parameter yang tidak bias dan efisien. Uji asumsi klasik yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinieritas untuk memastikan tidak ada korelasi antar variabel independen, sedangkan uji heteroskedastisitas untuk menjamin kesamaan varians residual (Sihombing et al. 2024).

4. Uji Statistik

Uji statistik merupakan prosedur inferensial untuk menguji hipotesis berdasarkan data sampel, menentukan signifikansi pengaruh variabel dan mendukung pengambilan keputusan ilmiah dengan tingkat signifikansi 0,05 (Anam 2020). Uji t digunakan untuk menguji signifikansi setiap parameter secara parsial. Uji f menghasilkan signifikansi simultan seluruh variabel independen terhadap dependen. Uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen (Sitepu and Sinagara 2018).

Untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai batasan dan teknis pengukuran setiap variabel, berikut disajikan definisi operasional serta instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini:

Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Tingkat kemiskinan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu memenuhi

kebutuhan dasar yang layak, yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan (Takaredas, Baruwadi, and Akib 2024). Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan Foster Greer Thorbecke (FGT) untuk menghitung indikator kemiskinan, yang terdiri atas tiga komponen utama yaitu Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Aprillyana 2020). Dalam penelitian ini menggunakan indikator P0 dengan perhitungan rumusnya sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

Keterangan:

- P_{α} : Persentase penduduk miskin
- Z : Garis kemiskinan
- y_i : Rata-rata pengeluaran penduduk dibawah garis kemiskinan
- q : Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
- n : Total penduduk miskin

Variabel Bebas (Variabel Independen)

Persaingan Ekonomi Politik

Persaingan ekonom politik merupakan tingkat kompetisi antar pelaku politik dalam proses demokrasi yang diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang merefleksik kualitas kebebasan politik, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi di tingkat nasional dan daerah (Simanjuntak and Djuyandi 2024). Untuk mengukur ketiga aspeknya IDI dapat di hitung menggunakan tiga rumus berikut:

$$IDLi = \sum_{j=1}^3 P_j \times I(A_{ij})$$

Keterangan:

- IDI_i : Indeks Demokrasi Indonesia untuk provinsi ke-i
- P_j : Bobot untuk masing-masing aspek
- I(A_{ij}) : Indeks aspek ke-j di provinsi ke-i

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya (Ramadhani, Fadila, and Safira 2024). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 maka dapat di klasifikasikan indikator belanja daerah terdiri atas presentase realisasi total belanja daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Tendean, Tinangon, and Datu 2021). Dalam penelitian ini indikator yang di gunakan presentase realisasi total belanja daerah. Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{resentase Realisasi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Yang direncanakan}} \times 100\%$$

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah persentase perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu yang berdampak pada kebutuhan pembangunan dan penyediaan layanan publik (Salsabila, Sri Agustin, et al. 2022). Berikut indikator yang dapat mengukur laju pertumbuhan penduduk, di antaranya angka fertilitas, mortalitas, migrasi dan presentase laju pertumbuhan penduduk (Fuadi 2021). Indikator yang di gunakan dalam penelitian ini yakni presentase laju pertumbuhan penduduk. Berikut rumus perhitungannya:

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1$$

Keterangan:

- r :laju pertumbuhan penduduk per tahun (dalam desimal),
- P_t :jumlah penduduk pada tahun ke-t,
- P_0 :jumlah penduduk pada tahun dasar,
- t :periode waktu dalam tahun.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel persaingan ekonomi politik (X1) memiliki nilai mean sebesar 74.74221, nilai median sebesar 75.51000, nilai tertinggi 89.21000 dan nilai terendah 54.41000 serta nilai standar deviasi adalah 6.022288. Variabel belanja daerah (X2) memiliki nilai mean sebesar 93.75226, nilai median sebesar 95.01000, nilai tertinggi 137.8700 dan terendah 10.00000 serta nilai standar deviasi adalah 10.52237. Variabel laju pertumbuhan penduduk (X3) memiliki nilai mean sebesar 1.608689, nilai median sebesar 1.530000, nilai tertinggi 4.130000 dan nilai terendah 0.380000 serta nilai standar deviasi adalah 0.612042. Variabel tingkat kemiskinan (Y) memiliki nilai mean sebesar 10.71141, nilai median sebesar 10.71141, nilai tertinggi 28.40000 dan nilai terendah 3.420000 serta nilai standar deviasi adalah 5.591523.

Model Estimasi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil uji chow pada Table 2 memperoleh Cross-section Chi-square dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Husman

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Random Effect Model* (REM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil uji husman pada Table 3 memperoleh Cross-section random dengan nilai probabilitas $0.0225 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model

terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Karena model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka tidak dilakukan Uji LM.

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, diantaranya Uji Chow dan Uji Hausman maka model terbaik dalam penelitian ini adalah *Fixed effect Model* (FEM) untuk menganalisis Pengaruh Persaingan Ekonomi Politik, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi *Fixed effect Model* (FEM), maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$TK = 14.8329111655 - 0.0570465290408*PEP - 0.000708064079868*BD + 0.129710738028*LPP + [CX=F]$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 14.8329111655 artinya tanpa adanya variabel Persaingan Ekonomi Daerah, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Penduduk, maka variabel Tingkat Kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 14.8329111655.
2. Nilai koefisien beta variabel Persaingan Ekonomi Politik sebesar -0.0570465290408. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel Persaingan Ekonomi Politik (X1) meningkat 1%, maka Tingkat Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0.0570465290408. Begitupun sebaliknya, jika Persaingan Ekonomi Politik (X1) menurun 1%, maka Tingkat Kemiskinan (Y) akan meningkat dalam besaran yang sama.
3. Nilai koefisien beta variabel Belanja Daerah sebesar -0.000708064079868. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel Belanja Daerah (X2) meningkat 1%, maka Tingkat Kemiskinan (Y) akan menurun sebesar -0.000708064079868. Sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel Belanja Daerah (X2) menurun 1%, maka variabel Tingkat Kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar nilai tersebut.
4. Nilai koefisien beta variabel Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.129710738028. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel Laju Pertumbuhan Penduduk (X3) meningkat 1%, maka variabel Tingkat Kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar 0.129710738028. Sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel Laju Pertumbuhan Penduduk (X3) menurun sebesar 1%, maka Tingkat Kemiskinan (Y) akan menurun dengan besaran yang sama.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel dependen dan independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Table 4, pada hasil uji ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar $-0.0891 < 0,80$, koefisien korelasi X1 dan X3 sebesar $-0.2106 < 0,80$, dan koefisien korelasi X2 dan X3 sebesar -0.0571

$< 0,80$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari multikolinearitas, artinya setiap variabel tidak saling mempengaruhi secara kuat.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya gejala yang disebabkan karena adanya perbedaan antara varian residual satu dengan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Table 5, hasil uji ini menunjukkan nilai Prob F-statistik sebesar $0.7963 > 0,05$, serta nilai Prob Chi-Square sebesar $0.7933 > 0,05$ maka dapat disimpulkan data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

berikut hasil uji t pada penelitian ini:

1. Hasil uji t pada variabel Persaingan Ekonomi Politik (X1) memiliki nilai t hitung sebesar $-5.428893 > t$ tabel 1.96785 (dilihat dari nilai absolut) dan nilai signifikan $0.0000 > 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian secara parsial variabel Persaingan Ekonomi Politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
2. Hasil uji t pada variabel Belanja Daerah (X2) memiliki nilai t hitung sebesar $-0.159552 < t$ tabel 1.96785 dan nilai signifikan $0.8734 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian secara parsial variabel Belanja Daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
3. Hasil uji t pada variabel Laju Pertumbuhan Penduduk (X3) memiliki nilai t hitung sebesar $1.052612 < t$ tabel 1.96785 dan nilai signifikan $0.2935 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian secara parsial variabel Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

2. Uji Simultan (Uji f)

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan (uji f) dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini. Diketahui dari hasil uji nilai f hitung sebesar 500.3389 lebih besar dari f tabel $2,63$ dan probabilitas sebesar $0.000000 < 0,05$. Artinya Persaingan Ekonomi Politik, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji determinan R^2 dilakukan untuk mengukur seberapa baik model regresi mampu menjelaskan variasi atau perubahan dalam variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independent secara simultan. Hasil uji determinan dapat dilihat pada Table 8, hasil uji

determinan menggunakan regresi data panel memakai *Fixed Effect Model* (FEM) di dapat nilai R-Square sebesar 0.82611. Artinya variabel persaingan ekonomi politik, belanja daerah dan laju pertumbuhan penduduk mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan sebesar 82,61%, sebaliknya variabel lain yang tidak dimasukkan dalam riset ini mempengaruhi sisanya sebesar 17,39%.

Diskusi

Pengaruh Persaingan Ekonomi Politik Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), variabel persaingan ekonomi politik (X1) menunjukkan koefisien sebesar -0,057 dengan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$, yang menyatakan bahwa persaingan ekonomi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sehingga dapat di simpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Khasanah (2021), dengan judul “Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintah dan Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. Hasil temuan ini juga didukung oleh Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*) yang dikaitkan dengan Teori Institusional. Teori ini menjelaskan bahwa persaingan politik yang sehat menciptakan mekanisme *check and balance*, mengurangi peluang elit untuk melakukan *rent-seeking* atau monopoli sumber daya. Dengan adanya persaingan, pemerintah daerah dipaksa untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan adil, terutama dalam program-program pro-kemiskinan, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi data panel Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), variabel belanja daerah (X2) menunjukkan koefisien negatif -0,0007, namun nilai probabilitas $0,8734 > 0,05$, yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil penelitian ini searah namun kurang kuat dengan hasil tidak signifikan dibandingkan penelitian oleh Roario Estevan Rosang, Maulana Th. B. Maramis, George M.V. Kawung (2025) dengan, dengan judul “The Influence of Local Government Expenditure Realization and Investment on The Poverty Rate in Nabire Regency”, yang menyatakan belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hipotesis yang di bangun teori Keuangan Publik Richard Musgrave (1959) menyatakan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu alokasi sumber daya melalui penyediaan barang publik, distribusi pemerataan pendapatan melalui belanja sektor pendidikan dan kesehatan, serta stabilisasi keseimbangan ekonomi makro, sehingga belanja daerah dapat secara efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Namun berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan penelitian ini tidak searah dengan

teori tersebut dan penelitian sebelumnya. Pertama ketidakefektifan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana dominasi belanja rutin gaji dan operasional yang menyebabkan alokasi untuk belanja modal dan program pro-kemiskinan menjadi minimal. Kedua, realokasi anggaran akibat Pandemi Covid-19 juga mengganggu kesinambungan program pengentasan kemiskinan (Potale, Dai, and Santoso 2024). Hal ini ditekankan oleh Adolf dalam teori hukum wagner, bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak selalu berdampak efisien terhadap kesejahteraan sosial jika didominasi oleh belanja daerah yang bersifat non-produktif (Solikin 2018). Sehingga tiga fungsi utama pemerintah yaitu alokasi sumber daya, distribusi pemerataan pendapatan dan stabilitas keseimbangan ekonomi makro yang dinyatakan oleh Richard Musgrave dalam teori keuangan publik tidak sesuai dengan kondisi pengeluaran pemerintah yang sebenarnya, karena belanja daerah yang disalurkan di seluruh provinsi di Indonesia masih di dominasi oleh belanja yang bersifat non-produktif seperti yang dikatakan Adolf dalam teori hukum wagner.

Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), variabel laju pertumbuhan penduduk (X3) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,1297 dengan nilai probabilitas $0,2935 > 0,05$, yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dapat di simpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hasil penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Murjani Adi Perkasa, Syahrithuah Siregar (2024), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angka Partisipasi Kasar, dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2015-2019”.

Hasil penelitian yang tidak searah ini dilatarbelakangi oleh adanya faktor transisi bonus demografi di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk nasional yang cenderung menurun dari 1,25% pada 2015 menjadi 0,89% pada 2023, hal ini meningkatkan proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun mencapai 70%. Kondisi demografi optimal ini secara efektif menetralkan tekanan sumber daya yang secara tradisional diprediksi oleh model Malthusian, sebaliknya berpotensi mendorong peningkatan produktivitas dan tabungan nasional (Siburian et al. 2025).

Hasil temuan ini juga didukung oleh teori bonus demografi oleh Gary Becker tahun 1960 dalam kerangka *Human Capital Theory*. Teori tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan populasi menjadi aset dan memicu dividen demografi apabila didukung oleh struktur usia produktif yang tinggi, yang dapat menstimulasi investasi pada modal manusia dan pertumbuhan ekonomi per kapita. Selain itu, temuan ini sejalan dengan perspektif ekonomi Islam yang mengedepankan pemberdayaan umat melalui instrumen seperti zakat dan wakaf

dalam mengelola dinamika demografi sebagai potensi berkah, bukan sebagai beban (Meo et al. 2025).

Pengaruh Persaingan Ekonomi Politik, Belanja Daerah, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Secara Simultan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Hasil uji f atau uji simultan menunjukkan nilai statistik sebesar 500,338 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,82611 menjelaskan bahwa 82,61% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, sementara sisa sebesar 17,39% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti tingkat pendidikan, inflasi, maupun ketersediaan lapangan kerja.

Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Persaingan Ekonomi Politik, Belanja Daerah, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Ekonomi syariah memandang kemiskinan sebagai kegagalan distribusi (*zulm iqtishadi*) yang menghambat pencapaian *falah*. Oleh karena itu, instrumen redistribusi seperti zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf produktif dioptimalkan untuk mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Upaya ini bertujuan menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi berbasis tauhid guna menjamin perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan harta (*hifdz al-mal*) sesuai prinsip maqasid syariah (Arbiansa et al. 2025).

Dalam islam memerintahkan prinsip keadilan (*al-adl*), ihsan, dan memberi kepada kerabat, perintah tersebut merupakan firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]:90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ ٩٠

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.*” (QS. An-Nahl [16]:90).

Menurut Ibnu Katsir, QS. An-Nahl [16]: 90 menetapkan tiga parameter etika sosial, yakni keadilan (*al-'adl*), kebajikan (*al-ihsan*), dan kepedulian terhadap kerabat, sekaligus melarang kezaliman dalam bentuk perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dalam perspektif ekonomi, Ibnu Katsir menekankan bahwa keadilan mewujud dalam penunaian kewajiban secara seimbang, sementara *ihsan* menjadi instrumen penguat etika distribusi yang melampaui standar kewajiban formal (Muin, Abubakar, and Mahfud 2025).

Prinsip ini menuntut kebijakan belanja daerah untuk menjamin pemerataan akses sumber daya guna memitigasi dampak laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan. Selain itu, penegakan nilai *al-'adl* berfungsi sebagai pengendali dalam persaingan ekonomi politik agar tidak terjadi eksploitasi atau konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan

mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani ini, pengelolaan instrumen ekonomi daerah dapat diarahkan untuk mengoreksi kegagalan distribusi dan mewujudkan kesejahteraan kolektif (*al-falah al-ijtima'i*) di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial persaingan ekonomi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan belanja daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa hanya kualitas persaingan politik yang secara konsisten mampu menurunkan kemiskinan, sementara belanja daerah dan laju pertumbuhan penduduk belum bekerja optimal. Secara simultan, persaingan ekonomi politik, belanja daerah dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2015–2023. Dalam tinjauan Ekonomi Islam, fenomena kemiskinan dipandang sebagai kegagalan distribusi (*zulm iqtishadi*) yang menghambat tercapainya *falah*. Integrasi prinsip Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nahl ayat 90, menegaskan pentingnya nilai keadilan (*al-'adl*), kebajikan (*al-ihsan*), dan kepedulian sosial sebagai fondasi kebijakan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kompetisi politik yang sehat, perbaikan komposisi dan efektivitas belanja daerah yang lebih produktif dan pro-kemiskinan, serta pengelolaan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, kualitas tata kelola, dan instrumen ekonomi Islam (zakat, infak, wakaf) agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah Sa'diyah El, (2020). "Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya". *Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43-50.
- Agus Triono, Tomi, and Reno Candra Sangaji. 2023. "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022." *Journal of Society Bridge* 1(1):59–67. doi:<https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>.
- Agustia, Diana, Siska Yuli Anita, and Diah Mukminatul Hasimi. 2025. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Di 6 Provinsi Pulau Sulawesi Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2019-2024." *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 5(1):176–92. doi:<https://doi.org/10.55606/optimal.v5i1.5738>.
- Alkire, Sabina, and James Foster. 2011. "Counting and Multidimensional Poverty Measurement." *Journal of Public Economics* 95(7–8):476–87. doi:10.1016/j.jpubeco.2010.11.006.
- Amin, Darwis. 2023. "Pemerataan Dan Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Syariah)." *Journal of Islamic Economic and Business (JIEBI)* 05(01):1–17. doi:<https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5474>.
- Anam, Choirul. 2020. "Jenis Uji Statistik Untuk Analisis Hasil Penelitian." *Jurnal Berkala Fisika* 23(4):115–17.

- Anggun, and Nur Indah Sari. 2024a. "Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022." *Ekodestinas: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pariwisata* 2(1):17–35. doi:10.59996/ekodestinas.v2i1.406.
- Anggun, and Nur Indah Sari. 2024b. "Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022." *EKODESTINASI: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pariwisata* 2(1):17–35. doi:10.59996/ekodestinas.v2i1.406.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2017. "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 8(2):169–88. doi:https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60.
- Aprillyana, Nia. 2020. "Estimasi Indikator Kemiskinan Tingkat Kecamatan Menggunakan Regresi Kekar M-Kuantil." 3(2):1–18. doi:10.32630/sukowati.v3i2.87.
- Arbiansa, Ifan, M. Yusuf Bahtiar, and Ersi Sisdianto. 2025. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 9(3):1670–91. doi:https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6469.
- Azwardi, and Abukosim. 2007. "Pengelolaan Keuangan Pedesaan Dalam Mendorong Pembangunan Wilayah Pedesaan: Suatu Tinjauan Teoritis." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5(2):127–34.
- Badan Pusat Statistik. 2022. "Indeks Demokrasi Indonesia." <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjI5MiMx/indeks-demokrasi-indonesia-2015-2019.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2025a. "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi." <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi.html?year=2025>.
- Badan Pusat Statistik. 2025b. "Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi Dan Daerah (Persen)." <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2025.html>.
- Barabasi, Haidar Akhmad Al, and Hastarini Dwi Atmanti. 2025. "Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2017- 2023 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 3(1):222–34. doi:https://doi.org/10.59024/jise.v3i1.1097.
- Bawimbang, Patricia M. I., Ita Pingkan Rorong, and Hanly F. Dj Siwu. 2021. "Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado." *Journal EMBA* 9(2):523–31.
- Besley, Timothy, Torsten Persson, and Daniel M. Sturm. 2008. "Political Competition, Policy and Growth: Theory and Evidence from the US." *NBER Working Paper* 1–22. doi:10.1111/j.1467-937X.2010.00606.x.
- Bunga, Elisabeth Ngole, and Tri Haryanto. 2024. "Analisis Faktor-Faktor Yangmempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2023." *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 8(3):3016–31. doi:https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4834.
- Cahyo, Bagas Dwi, Anggi Sasmita Setyowati, and Agung Prabowo. 2022. "Pearson Correlation Between Education Level and Population Growth on Poverty in Central Java, 2019-2021." *International Journal of Business, Economics, and Social Development* 3(4):174–80. doi:10.46336/ijbesd.v3i4.349.
- Calabrese, Annunziata. 2020. "The Impact of Political Competition on Countries ' Economic Development Through the Public Decision-Making Processes." *Annals of Social & Management Studies* 5(5):101–4. doi:10.19080/ASM.2020.05.555672.
- DJPK. 2025. "Presentase Realisasi Belanja Daerah." <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=1&tahun=2023&provinsi=10&pemd>

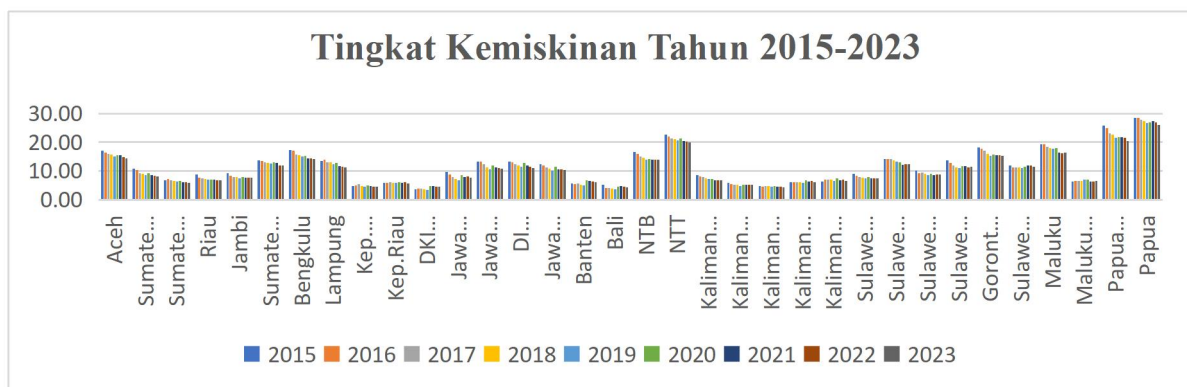
a=00.

- Fitriana, Ika Nur Laily, and Mohammad Okky Mabur. 2020. "Cluster Analysis Of Covid-19 Impact On Poverty In Indonesia Using Self-Organizing Map Algorithm." *Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi Statistik* 12(3):85–94. doi:https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v14i1.389.
- Fuadi, Helmy. 2021. "Analisis Dampak Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk (Data SP2020) Terhadap Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Nusa Tenggara Barat." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3(2):148–55. doi:https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/45.
- Habibah, Aminah Nur, Ruslan Abdul Ghafur, Erike Anggraeni, and Anas Malik. 2020. "Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(2):251–58. doi:10.29040/jiei.v6i2.1014.
- Heriqbaldi, Unggul, Wahyu Wisnu Wardana, Iqram Ramadhan Jamil, Julie Ann Q. Basconcillo, and Silviana Taniu. 2025. "Bridging the Gap : The Impact of Suramadu Bridge Provision on Poverty Reduction in Madura Island , Indonesia." *Social Sciences & Humanities Open* 12(101740):1–12. doi:10.1016/j.ssaho.2025.101740.
- Humairah, Faiza, and Alimuddin. 2023. "Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi." *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 2(1):1–13. doi:https://doi.org/10.22373/jibes.v2i1.2519.
- Khara, Dr. Nabin Kumar, and Tuni Soren. 2025. "Émile Durkheim and Talcott Parsons : Sociological Ideas." *RESEARCH HUB International Multidisciplinary Research Journal* 12(5):137–44. doi:10.53573/rhimrj.2025.v12n5.017.
- Khasanah, Lailatul. 2021. "Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan Dan Korupsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Bharanomics* 1(2):75–81. doi:https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.156.
- Lestari, Widya Indri, and Ida Busnetty. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Per Provinsi Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(03):3136–44. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6208.
- Meo, Theresia Balok, Delon Louiciano Baowolo, Benediktus Apriliano Maro, and Enike Tje Yustin Dima. 2025. "Memanfaatkan Bonus Demografi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Antara Potensi Produktif Dan Ancaman Pengangguran." *Musyatar: Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 21(12):1–8. doi:https://do.org/10.8734/mnmae.v1i2.359.
- Meytriana, Azzahra, Githa Marsyalia Azahra, Keysya Muyasaroh Khasanah, Puja Audinia Artika, and Hotman. 2025. "Peran Ekonomi Politik Dalam Menanggulangi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia." *BENEFIT:Journal Of Business, Economics, And Finance* 3(2):478–93. doi:https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1259.
- Muin, Tri Subegti Fatchul, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfud. 2025. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Keadilan Fiskal: Fondasi Teologis Ayat-Ayat Makroekonomi Islam Terhadap Pengentasan Kemiskinan." *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5(2):294–307. doi:10.36701/al-khiyar.v5i2.2696.
- Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. 2024. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *Jurnal Manajemen* 3(3):175–89. doi:https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918.
- Perkasa, Muhammad Murjani Adi, and Syahrituah Siregar. 2024. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angka Partisipasi Kasar, Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2015-2019." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 7(1):254–64. doi:https://doi.org/10.20527/jiep.v7i1.70.
- Potale, Arif, Sri Indriyani S. Dai, and Ivan Rahmad Santoso. 2024. "Analisis Struktur Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia." *Oikos-Nomos Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 17(2):92–105. doi:https://doi.org/10.37479/jkeb.v17i2.27313.

- Purwanti, Endang. 2024. "Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4(1):1–10. doi:<https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>.
- Rabani, Mutiara Raya, and Ruth Eviana Hutabarat. 2025. "Pengaruh Belanja Daerah, PAD dan Ipm Terhadap Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024." *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 9(3):2206–26. doi:<https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6567>.
- Ramadhani, Dina Rizky, Widya Nur Fadila, and Nita Safira. 2024. "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dan PDRB Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kalimantan Barat." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 5(1):20–37. doi:10.33105/jmp.v5i1.511.
- Romadhona, Wulanova, and Venita Syavera. 2025. "Generalized Linear Model Menggunakan Distribusi Lognormal Dan Gamma : Aplikasi Terhadap Indeks Demokrasi Indonesia Di Jawa Barat." *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2(1):117–26. doi:<https://doi.org/10.52447/gov.v9i2.7736>.
- Rosana, Ellya. 2019. "Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14(1):19–34. doi:<https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4483>.
- Rosang, Romario Estevan, Mauna Th. B. Maramis, and George M. V. Kawung. 2025. "The Influence of Local Government Expenditure Realization and Investment on The Poverty Rate in Nabire Regency." *JRSSEM: Journal Research Of Social Science Economics and Management* 05(1):2778–85. doi:<https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i1.966>.
- Salsabila, Syahnaz, Ade Sri Agustin, Shinta Kirana Wijayanti, and Dedek Kustiawati. 2022. "Analisis Penerapan Deret Ukur Dalam Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2(8):1297–1304. doi:10.59141/comserva.v2i8.484.
- Santoso, Katamso Noto, Fayadh Abiyyi, Andika Roy, and Khian Marselino. 2022. "Analisis Spasial Kemiskinan Pada Masa Pemulihan Pandemi Covid-19 Di Jawa Barat Tahun 2021." *Jurnal Santika Dan Alikasinya* 6(2):288–99. doi:<https://doi.org/10.21009/JSA.06214>.
- Saputri, Sherly Adelia Ahyani, and Antoni Sitorus. 2025. "Analisis Pengeluaran Pemerintah, Upahminimum Provinsi Dan Investasi Pmdn Terhadap Jumlah Pendudukmiskin Di Pulau Sumatera." *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, DAN Akuntansi* 9(1):251–67. doi:<https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.4897>.
- Sianturi, Vania Grace, M. Syafii, and Ahmad Albar Tanjung. 2021. "Analisis Determinasi Kemiskinan Di Indonesia Stusi Kasus (2016-2019)." *Jurnal Samudra Ekonomika* 5(2):125–33. doi:<https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>.
- Siburian, Eka Saripa, Era Mustika Ginting, Meilany Dwi Syahfitri, and Bonaraja Purba. 2025. "Bonus Demografi Sebagai Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan* 11(1):123–28. doi:<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9738>.
- Sihombing, Pardomuan Robinson, Ade Marsinta Arsani, Usep Nugraha, and Akhmad Mun'im. 2024. *Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel Dalam Berbagai Software*. satu. edited by L. Hakim. Tangerang Banten, Indonesia: Minhaj Pustaka.
- Simanjuntak, Andreas Saut, and Yusa Djuyandi. 2024. "Gen-Z Dan Politik: Menelusuri Strategi Kampanye Media Sosial Atalia Praratya Dalam Pemilu Legislatif 2024." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3(2):62–74. doi:10.24198/aliansi.v3i2.56107.
- Sitepu, Rasidin Karo-Karo, and Bonar M. Sinagara. 2018. *Aplikasi Model Ekonometrika Estimasi, Simulasi Menggunakan Program SAS 9.2*. Satu. Bogor, Indonesia: IPB Press.
- Smas, Musa Hefer, Meggy Merlin Mokay, Endang Nurhayati, and Margana. 2025. "Overcoming Extreme Poverty through the Utilisation of Village Funds: A Case Study in Indonesia." *Societal Impacts* 6(100128):1–3. doi:10.1016/j.socimp.2025.100128.
- Solikin, Akhmad. 2018. "Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang : Tinjauan Sistematis." *Jurnal Info Artha* 2(1):65–89.
- Sudana, I. Made, and Rahmat Heru Setianto. 2024. *Metode Penelitian Bisnis Dan Analisis Data*

- Dengan SPSS Dan Eviews. Dua. edited by S. Saat. Jakarta: Erlangga.
- Susanti, Ebi, and Nurul Bariyah. 2023. "Democracy And Poverty In Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 6:111–36. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2024/05/10.pdf>.
- Susanto, Rudy, and Indah Pangesti. 2019. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta" *Journal of Applied Business and Economic* 5(4):340–50.
- Susilo, Aldin. 2025. "Antara Kemiskinan, Potensi Zakat Dan Pembangunan Berkelanjutan (Menyelisik Problematika Zakat Di Indonesia)." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6(5):2255–66. doi:<https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.7775>.
- Syukron, Muhammad, and Hafidz Muhammad Fahri. 2018. "Pendekatan Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Jumlah Angkatan Kerja Dan Penanaman Modal Luar Negeri Terhadap PDRB Provinsi Di Indonesia." *Journal of Applied Statistic* 1(2):100–116. doi:<https://doi.org/10.13057/ijas.v1i2.26172>.
- Takaredas, Risnawati, Mahludin H. Baruwadi, and Fitri Hadi Yulia Akib. 2024. "Hubungan Antara Kontribusi Sektor Pertanian Pada PDRB Dengan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (Jsep)* 1(3):147–54.
- Tasriani, Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, and Nurhayati Nurhayati. 2024. "Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 14(2):167–84. doi:10.15642/elqist.2024.14.2.167-184.
- Tendean, Lanny, Jantje J. Tinangon, and Christian V. Datu. 2021. "Evaluasi Penerapan Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa." *Jurnall Riset Akuntansi* 16(3):198–208. doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/36332>.
- Unat, Ebru. 2020. "A Review Of Malthusian Theory Of Population Under The Scope Of Human Capital." *FORCE: Focus on Research in Contemporary Economics* 1(2):132–47.
- Wahyudi, Setyo Tri. 2020. *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*. Dua. edited by Monalisa. Depok: Rajawali Pers.
- Widodo, Edy, Eli Suriani, Intan Putri Ristianingrum, and Gita Evi Kusumandari. 2019. "Analisis Regresi Panel Pada Kasus Kemiskinan Di Indonesia." *PRISMA: Prosiding Seminar Nasional Matematika* 2:710–17.

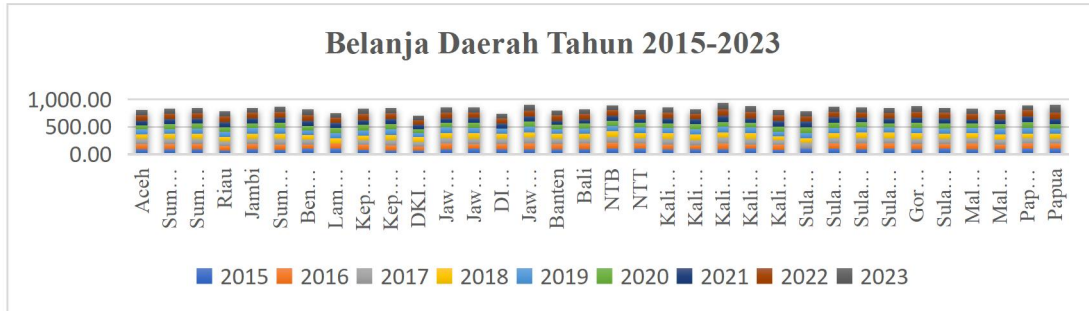
GAMBAR DAN TABEL



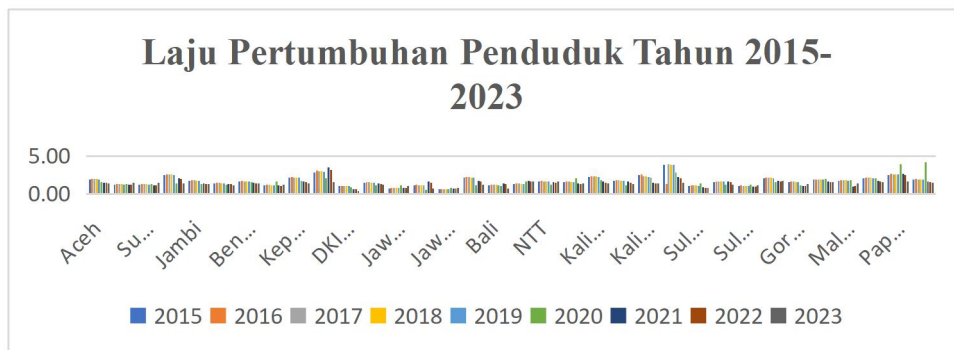
Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di 34 provinsi Indonesia
 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015-2023



Gambar 2. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi di 34 provinsi Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015-2023



Gambar 3. Belanja Daerah di 34 provinsi Indonesia
Sumber: Direktorat Jendral Kementerian Keuangan, 2015-2023



Gambar 4. Laju Pertumbuhan Penduduk di 34 Provinsi Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015-2023

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	10.71141	74.74221	93.75226	1.608689
Median	8.990000	75.51000	95.01000	1.530000
Maximum	28.40000	89.21000	137.8700	4.130000
Minimum	3.420000	54.41000	10.00000	0.380000
Std. Dev.	5.591523	6.022288	10.52237	0.612042

Sumber: Eviews 13 (data diolah, 2025)

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	451.276354	(33,268)	0.0000
Cross-section Chi-square	1230.808155	33	0.0000

Sumber: Eviews 13 (data diolah, 2025)

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.581860	3	0.0225

Sumber: Eviews 13 (data diolah, 2025)

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.08912746211617555	-0.2106298923980384
X2	-0.08912746211617555	1.000000	-0.05712068261484911
X3	-0.2106298923980384	-0.05712068261484911	1.000000

Sumber: Eviews 13 (data diolah, 2025)

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.340216	Prob. F(3,301)	0.7963
Obs*R-squared	1.030715	Prob. Chi-Square(3)	0.7938
Scaled explained SS	0.525928	Prob. Chi-Square(3)	0.9132

Sumber: Eviews 13 (data diolah, 2025)

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.83291	0.919442	16.13252	0.0000
X1	-0.057047	0.010508	-5.428893	0.0000
X2	-0.000708	0.004438	-0.159552	0.8734
X3	0.129711	0.123227	1.052612	0.2935

Sumber: Eviews 13 (data diolah, 2025)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji f)

F-statistic	500.3389
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews 13 (data diolah, 2025)

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi

R-squared	0.826116
Adjusted R-squared	0.802758

Sumber: Eviews 13 (data diolah, 2025)